

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 2015 di IPDN Kampus Sulawesi Utara

Erick Kaloh^{a, 1*}

^a Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Remboken, Indonesia

¹ erickkaloh01@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Key word:
Implementation,
Minister of Home Affairs
Regulation,
IPDN

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the parenting system at IPDN North Sulawesi Campus and as input for leaders in making policies to prepare professional government cadres who have faith and devotion to God Almighty, have a noble personality and have a high work ethic in providing service to the community. This research took place at IPDN North Sulawesi Campus using qualitative research methods. The results of the research are (a) Development Materials; lack of understanding of coaching materials, (b) Comparison of the number of caregivers and praja; shortage of caregivers in the process of implementing care, (c) Facilities and infrastructure; already adequate and provided according to the needs of the IPDN dictionary but there are some that are damaged and cannot be used, (d) Parenting systems, methods and techniques; lack of understanding of the parenting system, the methods used are appropriate while the parenting techniques are not understood, (e) Competence of caregiver resources; lack of creativity on the part of caregivers.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi,
Peraturan Menteri Dalam
Negeri,
IPDN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa Implementasi sistem pengasuhan di IPDN Kampus Sulawesi Utara dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan penyiapan kader pemerintahan profesional yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur dan mempunyai etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertempat di IPDN Kampus Sulawesi Utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian yaitu (a) Materi Pembinaan; kurangnya pemahaman tentang materi pembinaan, (b) Perbandingan jumlah pengasuh dan praja; kekurangan pengasuh dalam proses pelaksanaan pengasuhan, (c) Sarana dan prasarana; sudah memadai dan diadakan sesuai dengan kebutuhan kamus IPDN namun ada beberapa yang rusak dan tidak bisa digunakan, (d) Sistem, metode dan teknik pengasuhan; kurangnya pemahaman tentang sistem pengasuhan, metode yang dijalankan sudah sesuai sedangkan teknik pengasuhan belum dipahami, (e) Kompetensi sumber daya pengasuh; kurangnya kreatifitas dari para pengasuh.

Copyright © 2021 (Erick Kaloh). All Right Reserved

1. Pendahuluan

* Korespondensi Penulis.; e-mail: erickkaloh19@gmail.com

Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah Lembaga Pendidikan Kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mencetak atau menghasilkan aparat atau Pamong Praja yang berkualitas unggul, memiliki kompetensi dan jati diri kepomongprajaan, dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat mendayagunakan modal intelektual untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat menghadapi peluang, tantangan dan perkembangan global yang semakin pesat sehingga mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan dapat mewujudkan pelaksanaan *GoodGovernance* [1].

IPDN Kampus Sulawesi Utara di Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Kampus Daerah yang menyelenggarakan pendidikan kepomongprajaan program Diploma. Dimana Kampus Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Direktur, resmi mulai dijalankan sejak tahun 2010. Sejak awal dibuka sampai saat ini tentunya dihadapkan pada persoalan-persoalan implementasi kebijakan peraturan tata kehidupan praja. Menurut data yang didapat dari kepala bagian administrasi di kampus IPDN Sulawesi Utara, Penyelenggaraan pola pendidikan Kedinasan dengan kondisi jumlah praja 2.326 orang praja yang telah mengikuti pendidikan di IPDN Kampus Sulawesi Utara sebagaimana data jumlah Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2010 hanya ada satu angkatan dengan jumlah Praja 100 orang muda praja tingkat satu terdiri dari 73 orang putra dan 27 orang putri, tahun 2011 menjadi dua angkatan dengan ketambahan 98 orang muda praja tingkat satu dengan total jumlah Praja 198 orang terdiri dari 68 orang putra dan 30 orang putri muda praja tingkat satu sedangkan tingkat dua madya praja yaitu praja yang naik tingkat dari tahun sebelumnya terdiri dari 73 orang putra dan 27 orang putri, tahun 2012 dua angkatan dengan jumlah praja 344 orang terdiri dari 199 orang putra dan 73 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 56 orang putra dan 16 orang putri, tahun 2013 dua angkatan dengan jumlah praja 361 orang terdiri dari 59 orang putra dan 65 orang putri tingkat satu muda praja sedangkan tingkat dua madya praja terdiri dari 178 orang putra dan 59 orang putri, tahun 2014 adalah praja yang sama dari tahun sebelumnya yang naik tingkat dengan jumlah praja 361 orang terdiri dari 59 orang putra dan 65 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 178 orang putra dan 59 orang putri, tahun 2015 dua angkatan dengan jumlah praja 180 orang terdiri dari 65 orang putra dan 30 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 60 orang putra dan 25 orang putri, tahun 2016 dua angkatan dengan jumlah praja 130 orang terdiri dari

26 orang putra dan 10 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 57 orang putra dan 37 orang putri, tahun 2017 dua angkatan dengan jumlah praja 142 orang terdiri dari 68 orang putra dan 36 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 26 orang putra dan 12 orang putri, tahun 2018 dua angkatan dengan jumlah praja 176 orang terdiri dari 100 orang putra dan 50 orang putri tingkat dua madya praja sedangkan tingkat tiga nindya praja terdiri dari 16 orang putra dan 10 orang putri, tahun 2019 sampai 2020 hanya satu angkatan dengan jumlah praja 334 orang yang terdiri dari 209 orang putra dan 125 orang putri. Dari jumlah praja tahun ke tahun kadang terjadi peningkatan jumlah kadang juga turun. Sumber data Bagian Administrasi Keprajaan tahun 2020.

Salah satu unsur penting dalam pendidikan kedinasan IPDN adalah bidang pengasuhan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pengasuhan merupakan proses yang berjalan secara simultan dan terintegrasi dengan upaya-upaya pendidikan lainnya. Kegiatan pengasuhan sebagai bagian dari upaya pendidikan kedinasan dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan kepribadian peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral, etika dan sebagai kaderpemerintahan yang mempunyai karakter kepomongprajaan, cerdas dan terampil. Namun pada kenyataannya *output* yang dihasilkan justru menimbulkan suatu hal yang kontradiksi dimana praja /prilaku praja dalam melaksanakan atau mengikuti pendidikan tidak sedikit yang melakukan penyimpangan-penyimpangan atau prilakunya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan [2].

Berdasarkan masalah pokok dalam pembatasan masalah yang berhubungan dengan sistem pengasuhan di IPDN, dapat dirumuskan secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (*research Question*) sebagai berikut: “BAGAIMANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGASUHAN DI IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2015?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa Implementasi sistem pengasuhan di IPDN Kampus Sulawesi Utara dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan penyiapan kader pemerintahan profesional yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian luhur dan mempunyai etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin

dicapai, maka desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian non hipotesis, sehingga langkah awal penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis, karena tidak perlu menguji, namun memaparkan temuan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah penelitian [3].

2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini informan adalah sumber data yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi, yang selanjutnya akan menjadi bahan olahan dan acuan di dalam analisis data penelitian. Sesuai dengan desain penelitian yang menggunakan data kualitatif yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, (1) data primer, yang akan diperoleh langsung dari sumbernya atau nara sumber melalui wawancara. Informan sebagai sumber data dipilih secara purposive yang didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dengan

Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung, mengenai obyek yang diteliti sebagai acuan guna pengolahan dan mendeskripsikan kejadian yang telah berlangsung, baik berupa dokumen, eksplorasi internet dan berbagai literatur yang relevan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap penelitian selalu digunakan alat pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, menanyakan mengenai substansi yang dicari.
2. Dokumentasi, adalah teknik yang dilakukan melalui pemahaman dan mempelajari arsip-arsip sesuai obyek yang diteliti dengan cara mencatat;
3. Eksplorasi Internet, untuk memperoleh data kekinian dengan mempelajari dan mencatat bahan-bahan hasil penelitian yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan pengolahan data yang terkumpul, melalui teknik pengumpulan data. Untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan dilakukan secara triangulasi agar diperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari temuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan yang mampu untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan dengan tujuan.

Tahap Implementasi biasanya dikaitkan dengan tataran kebijakan, karena implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu kebijakan, Arti implementasi kebijakan menurut Solichin adalah "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak sesuatu, atau secara umum diartikan sebagai suatu proses pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digagaskan." [4].

Tahap implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam proses kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Demikian juga kebijakan yang bagus jika tidak diimbangi dengan implementasi yang optimal, maka akan menghasilkan kegagalan seorang pemimpin. Tidak menutup kemungkinan perubahan pada tahap implementasi dari suatu kebijakan juga berdampak pada kebijakan itu sendiri.

Istilah implementasi seperti halnya konsep lain dalam ilmu sosial, belum ada kesatuan pandangan, namun seringkali digunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Ketidaksamaan kesatuan definisi konseptual tentang implementasi tersebut, disamping memang merupakan fenomena yang biasa dalam ilmu sosial, juga disebabkan oleh kenyataan bahwa apa yang disebut aktivitas implementasi, merupakan tahapan yang kompleks dan rumit.

Peraturan dalam negeri nomor 63 tahun 2015 berisi tentang berbagai aturan dan standar kehidupan komunitas di Kampus IPDN. Pemahaman dan pengertian dari aturan yang tercantum dalam Peraturan dalam negeri, dianalisis oleh peneliti berdasarkan fakta yang terjadi di kampus IPDN Sulawesi Utara [5].

Kegiatan Praja di kampus IPDN Sulawesi Utara merupakan rangkaian kegiatan dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar kampus. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 2015, kegiatan praja yang dimaksud terdiri dari:

1. Kegiatan Pengajaran
Kegiatan pengajaran adalah rangkaian kegiatan yang menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan pemerintahan dalam proses belajar mengajar di IPDN.
2. Kegiatan Pelatihan
Kegiatan pelatihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang menitikberatkan pada penguasaan keterampilan praktek pemerintahan.

Kegiatan pelatihan meliputi:

- a. Pelatihan di kelas
- b. Ujian;
- c. Praktek lapangan dan bhakti karya praja (BKP)
- d. Latihan integrasi taruna dewasa (latsitarda)

3. Kegiatan Pengasuhan

Kegiatan Pengasuhan adalah suatu rangkaian kegiatan yang menitikberatkan pada pembentukan kepribadian prajadan atau internalisasi nilai-nilai kepamongprajaan dan nilai-nilai juang kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1 Materi Pembinaan

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 2015 dijelaskan bahwa materi pembinaan praja dilaksanakan dan diawasi pengasuh. Mater-materi tersebut meliputi:

1. Pembinaan mental dan spiritual;
2. Pembinaan kerja sama antar umat beragama
3. Pembinaan konseling
4. Pembinaan olahraga dan kesamaptaan jasmani;
5. Pembinaan seni, budaya dan kreatifitas;
6. Pembinaan kepemimpinan;
7. Pembinaan sikap kritis dan ilmiah;
8. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat;
9. Pembinaan penyaluran aspirasi.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan yang dikaitkan dengan materi pengasuh, secara umum sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 63 tahun 2015. Tujuan dari pembinaan praja adalah:

1. Terwujudnya kader aparatur pemerintahan yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Membina karakter, watak, rasa persatuan dan kesatuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
3. Mewujudkan praja yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai kader aparatur pemerintahan;
4. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara, kepemimpinan, kehidupan sosial beragama, pembentukan karakter dan pribadi yang sehat belumnya secara penuh

melingkupi materi pembinaan yang ada dalam peraturan. Yang dimaksudkan adalah materi menyangkut pembinaan mental dan spiritual, kerja sama antar umat beragama, konseling, olahraga dan kesamaptaan jasmani, seni budaya dan kreatifitas, kepemimpinan, sikap kritis dan ilmiah, kehidupan sosial masyarakat dan penyaluran aspirasi. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya informasi dan pengetahuan tentang materi pembinaan yang tentunya menjadi aspek penting dalam mencapai visi dan misi kampus IPDN.

Dalam pelaksanaan materi pembinaan, seharusnya lebih didalami lagi aspek-aspek penting. Pemahaman tentang hal tersebut sangat membantu dalam proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

Dari hasil wawancara juga peneliti menemukan kendala yang sedang dialami kampus IPDN, yakni: keterbatasan sumber daya Pengasuh dalam hal pengetahuan yang dikaitkan dengan keterbatasan waktu dari Pengasuh tersebut dan gaji yang menurut para pengasuh belum maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan kreatifitas pengasuh dalam mengelolah bahan ajar agar bisa dipahami oleh Praja, tidak digunakan secara maksimal.

Keterbatasan pengasuh dalam memahami dan memberikan materi tersebut kepada praja bukan hanya disebabkan minimnya pengetahuan yang dimiliki. Faktor lain yang mempengaruhi keterbatasan itu adalah kehidupan pribadi pengasuh. Kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sangat mempengaruhi kinerja pengasuh.

3.2 Keseimbangan Jumlah Pengasuh dan Praja

Pengasuhan merupakan upaya sadar untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas dan pencerahan pemikiran untuk mewujudkan kedewasaan praja yang mempunyai keseimbangan intelektual, kesemaptaan, kecerdasan emosional dan spiritual sebagai kader pemerintahan profesional yang memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Adapun pengasuhan terbagi atas 2 yaitu:

- a. Subjek pengasuhan, yang terdiri dari:
 - a. Pengasuh langsung, yaitu pihak yang memiliki wewenang Perintah, seperti Wakil Direktur III, Kepala Bagian Administrasi Keprajaan, Para Kepala Sub Bagian di jajaran Keprajaan dan Pengasuh Wisma dan pihak yang tidak memiliki wewenang Perintah, seperti Dosen, Pelatih dan Karyawan organik.
 - b. Pengasuh tidak langsung, yaitu Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Daerah dan alumni sekolah Pamong Praja

(KDC, APDN, STPDN, IIP), serta keluarga dan masyarakat.

- b. Objek pengasuhan
Objek pengasuhan adalah seluruh Praja IPDN Kampus Sulawesi Utara.

Berikut ini akan disajikan data tentang jumlah Pengasuh dan jumlah Praja di kampus IPDN Sulawesi Utara berdasarkan informasi dari Kepala Sub Bagian Pengasuhan:

1. Kepala Bagian Administrasi Keprajaan: 1 orang
2. Kepala Sub Bagian Pengasuhan: 1 orang
3. Kepala Bagian Sub Bagian Disiplin dan Asrama: 1 orang
4. Kepala Sub Bagian Ekstrakurikuler: 1 orang
5. Kasat Wira: 4 orang
6. Kasat Dharma/Pengasuh: 10 orang
7. Staff Bagian Pengasuhan: 1 orang
8. Praja IPDN Sulawesi Utara: 334 orang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menganalisis bahwa adanya kekurangan jumlah Pengasuh. Berdasarkan peraturan, ratio antara jumlah Pengasuh dan jumlah Praja adalah 1 berbanding 20. Jadi apabila jumlah Praja IPDN Sulawesi Utara berjumlah 334 orang, maka jumlah Kasat Dharma/Pengasuh haruslah 16, sedangkan pada kenyataannya, jumlah Kasat Dharma/Pengasuh hanya 10 orang.

Ketidak seimbangan antara jumlah pengasuh dan jumlah praja sangat mempengaruhi proses pengasuhan. Kekurangan jumlah pengasuh tentunya tidak akan memaksimalkan proses pengasuhan. Pengasuh yang seharusnya mengamati, mengontrol dan mengasuh maksimal 20 praja, kini menjadi kurang lebih 34 praja setiap pengasuh. Hal tersebut yang bisa menjadikan masukan bagi dewan pimpinan di kampus IPDN dan bahan pertimbangan demi proses pengasuhan yang sesuai dengan standar dalam peraturan dalam negeri nomor 63 tahun 2015.

3.3 Sarana dan Prasarana

Kegiatan Praja yang terdiri dari pengajaran, pelatihan dan pengasuhan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah:

1. Aspek Fisik, meliputi:
 - a. Kantor Pengasuhan yang representatif.
 - b. Kantor Simulasi Pemerintahan.
 - c. Perumahan / Mess Pengasuh.
 - d. Sarana Prasarana Kehidupan Praja yang memadai.
 - e. Kendaraan Operasional.
 - f. Fasilitas Komunikasi.
 - g. Sistem Komputerisasi.
 - h. Pakaian Dinas.
 - i. Wisma Praja.
 - j. Ruang Belajar

2. Aspek non Fisik, meliputi:
 - a. Standar kompetensi pengasuh.
 - b. Rasio jumlah pengasuh.
 - c. Administrasi pendukung.
 - d. Peraturan-peraturan tentang kehidupan Praja.
 - e. Reward dan Punishment.
 - f. Kepastian hukum.
 - g. Hubungan Pengasuh dan WBP
 1. J. Penilaian dan Evaluasi Pengasuhan.

Pada kenyataannya ada beberapa sarana dan prasarana yang masih belum bisa digunakan. Tentunya kekurangan jumlah wisma akan sangat berpengaruh pada kehidupan Praja. Saat ini wisma Praja IPDN berjumlah 8. Berdasarkan peraturan bahwa setiap wisma maksimal menampung 50 Praja. Dengan jumlah Praja sebanyak 334, maka seharusnya jumlah wisma yang disediakan berjumlah minimal 7 wisma. pada kenyataannya ada 3 wisma yang belum bisa digunakan. Oleh karena itu peneliti menganalisis bahwa perlunya perbaikan wisma agar penampungan dalam satu wisma bisa sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Kekurangan wisma saat ini tentunya memberikan ketidak-nyamanan bagi para Praja karena setiap wisma sudah melebihi kapasitas penampungan.

Praja mengalami kesulitan dalam kegiatan ekstrakurikuler karena alat yang ia gunakan rusak. Melalui kejadian ini, tentunya dalam perkembangan pelatihan di bidangnya akan terhambat. Hal tersebut harus diperhatikan karena menyangkut perkembangan pelatihan dari Praja.

Peneliti menyimpulkan bahwa saran dan prasarana di kampus IPDN telah diadakan sesuai dengan kebutuhan. Namun pada implikasinya ada beberapa sarana dan prasarana yang tidak bisa digunakan.

Sistem, Metode dan Teknik Pengasuhan

1. Sistem pengasuhan

Sistem pengasuhan yang diterapkan adalah Sistem Pengasuhan terintegrasi yang melibatkan tiga komponen yaitu : Kampus, Keluarga dan Masyarakat. Sistem pengasuhan harus ada keterkaitan dengan *Learning Organizing*.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa integritas dan kompetensi praja diperlukan pelaksanaan pola pengasuhan dengan model learning organization, pemodelan *learning organizing* dalam implementasi sistem pengasuhan di IPDN dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, mengidentifikasi masalah untuk mengetahui kondisi organisasi penyelenggara pengasuhan atau dalam hal ini adalah bagian pengasuhan IPDN; kedua, disamping menerapkan sistem pengasuhan yang

sudah ada dan sudah berjalan juga menerapkan konsep *Learning Organizing* dalam sistem pengasuhan; ketiga, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengasuhan yang berdasarkan *learning organizing* baik evaluasi jangka pendek maupun evaluasi jangka panjang.

2. Metode Pengasuhan

Metode pengasuhan meliputi metode “Among Asuh” (saling asah, saling asih dan saling asuh) dengan menerapkan asas-asas ing ngarso singtulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani dengan metode observasi, bimbingan dan penyuluhan serta keteladanan.

3. Teknik pengasuhan:

Teknik pengasuhan yang digunakan adalah :

- a. Instruksi, yaitu dengan pemberian perintah kepada Praja untuk mengetahui, meresapi dan melakukan serta tidak melakukan sesuatu dalam rangka meningkatkan keterampilan, ketangkasan, kemahiran kepribadian yang seimbang untuk mencapai kebulatan tujuan pendidikan.
- b. Persuasif, humanis, religius dan edukatif.
- c. Pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada Praja pada suatu hal tertentu.
- d. Pemberian ganjaran kepada Praja baik berupa penghargaan dan hukuman.
- e. Pemberian konseling, bimbingan dan penyuluhan.
- f. Pemberian dukungan dan arahan sehingga Praja mampu bersikap partidipatif, kritis, kreatif dan inovatif.
- g. Pemberian materi pengasuhan sesuai dengan tingkatan.

Peneliti menarik kesimpulan kurang memahami teknik yang dilaksanakan dalam kampus IPDN. Sistem yang diterapkan adalah sistem yang terintegrasi dengan kampus, keluarga dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode saling asih, saling asah dan saling asuh yang. Sistem antara senior dan junior kadangkala menjadi bumerang bagi kehidupan komunitas dan sistem pengasuhan yang terkait dengan *Learning Organizing*.

3.4 Kompetensi Sumber Daya Pengasuh

Peneliti menyimpulkan kurangnya pemahaman tentang standar Pengasuh, Perekrutan pengasuh adalah ASN lulusan pendidikan tinggi

kepomongprajaan, Kesenjangan dalam proses pengasuhan, Sistem senioritas bisa menjadi bumerang bagi proses pengasuhan, Kurangnya kreatifitas Pengasuh, Berpeluang mendapatkan pengasuh yang tidak memiliki standar pengasuh IPDN dikarenakan adanya perekrutan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

Kesimpulan

- a. Materi Pembinaan; kurangnya pemahaman tentang materi pembinaan
- b. Perbandingan jumlah pengasuh dan praja; kekurangan pengasuh dalam proses pelaksanaan pengasuhan
- c. Sarana dan prasarana; sudah memadai dan diadakan sesuai dengan kebutuhan kampus IPDN namun ada beberapa yang rusak dan tidak bisa digunakan
- d. Sistem, metode dan teknik pengasuhan; kurangnya pemahaman tentang sistem pengasuhan, metode yang dijalankan sudah sesuai sedangkan teknik pengasuhan belum dipahami.
- e. Kompetensi sumber daya pengasuh; kurangnya kreatifitas dari para pengasuh.

Referensi

- [1] IPDN, 2004. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Retrieved from <http://ipdn.ac.id/profil/>
- [2] IPDN Kampus Sulut. (2015, Agustus 6). Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara. Retrieved from <https://ipdnsulut.wordpress.com>
- [3] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,” Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta, 2011.
- [4] Solichin. “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara,” Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- [5] Peraturan dalam negeri nomor 63 tahun 2015 berisi tentang berbagai aturan dan standar kehidupan komunitas di Kampus IPDN Dalam Negeri.